Hukum Acara Perdata

Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian.

PUTUSAN

Reg. No. 370 K/Pdt/1984.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Raslam al. Rasmudi, bertempat tinggal di Desa Karanggambas, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, pemohon kasasi dahulu penggugat I-terbanding;

melawan

1. *Madarun*, Bau I,

2. *Ni Madarun*, keduanya bertempat tinggal di Desa Karanggambas, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, termohon-termohon kasasi dahulu para tergugat-pembanding;

dan

1. *Chamid*,

2. *Misem*,

3. *Slamet*,

4. *Suryat*,

5. *Maryun*,

6. *Sirat*,

7. *Tukiman*,

8. *Suhad*, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Karanggambas, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga; turut termohon-termohon kasasi dahulu penggugat II sampai dengan IX-pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi dan turut termohon-termohon kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang termohon-termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa ki Sanrodji Rijun telah melangsungkan perkawinan dengan ni Sanrodji Rijun, tetapi para penggugat asli tidak tahu pasti tahun dilangsungkannya perkawinan tersebut;

bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan lima orang anak, masing-masing bernama Kami, Raslam al. Rasmudi, Chamid, Misesem dan Slamet;

bahwa ki Sanrodji telah meninggal dunia pada tahun 1974, dan ni Sanrodji juga telah meninggal dunia sebelum ki Sanrodji;

bahwa anak pertama ki Sanrodji Rijun dan ni Sanrodji Rijun yang bernama Kani juga telah meninggal dunia;

bahwa Kami sebelum meninggal dunia telah melangsungkan perkawinan dengan ki Sanmungin dan meninggalkan lima orang anak, masing-masing bernama: Suryat, Maryun, Sirat, Tukiman dan Suhad;

bahwa dari perkawinan antara ki Sanrodji dan ni Sanrodji Rijun disamping meninggalkan keturunan seperti tersebut diatas, juga meninggalkan warisan berupa tanah sawah yang dikenal sekarang dengan letter C No. 442, persil No. 40 S.II yang luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugat;

bahwa barang warisan tersebut diatas pada sekitar tahun 1970 sampai sekarang telah dikuasai dan digarap oleh tergugat asli I;

bahwa para penggugat asli telah berusaha secara kekeluargaan menghubungi tergugat asli I agar persoalan ini dapat diselesaikan secara damai, tetapi para tergugat asli tidak bersedia dengan alasan tergugat asli I telah membeli sawah sengketa dari orang tua/kakek penggugat asli dan sawah sengketa dalam buku desa dinamakan tergugat asli II atas permintaan tergugat asli I;

bahwa akibat tindakan dari para tergugat asli tersebut sangat merugikan para penggugat asli karena para penggugat asli tidak dapat menggarap tanah sawah sengketa serta mengadakan pembagian waris sesuai dengan hukum yang berlaku;

bahwa atas dasar perhitungan yang wajar tanah sawah sengketa setiap tahun dapat menghasilkan padi kering 12 kwintal bersih;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Purbalingga supaya terlebih dahulu

meletakkan sita pendahuluan atas tanah sawah sengketa dan selanjutnya para penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya, bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum ki Sanrodji Rijun dan ni Sanrodji Rijun;
3. Menyatakan hukumnya, bahwa almarhum ki dan ni Sanrodji Rijun telah meninggalkan warisan berupa tanah sawah sengketa yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan hukumnya bahwa tanah sawah sengketa adalah milik syah dari para penggugat;
5. Menyatakan hukumnya bahwa para tergugat telah menguasai/menggarap tanah sawah sengketa secara tidak syah sejak tahun 1974;
6. Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II baik sendiri ataupun bersama atau siapa saja yang telah menguasai tanah sengketa lantaran tergugat I dan atau tergugat II agar menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada para penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
7. Menghukum para tergugat baik sendiri maupun bersama agar mengganti kerugian kepada para penggugat berupa padi kering sebanyak 12 kwintal setiap tahun terhitung mulai tahun 1974 sampai dengan keputusan ini berkekuatan hukum pasti;
8. Menghukum para tergugat baik sendiri ataupun bersama membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap hari bila para tergugat lalai tidak memenuhi bunyi putusan ini;
9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah syah dan berharga;
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
11. Biaya menurut hukum;

atau:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain agar memberikan keputusan yang adil dan layak;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 24 Oktober 1979 No. 15/1979.Pdt.G, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugat para penggugat untuk sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;.

Menyatakan hukumnya, bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum ki Sanrodji dan ni Sanrodji Rijun;

Menyatakan hukumnya bahwa almarhum ki dan ni Sanrodji Rijun telah meninggalkan warisan berupa tanah sawah sengketa yang belum dibagi waris;

Menyatakan hukumnya bahwa tanah sawah sengketa adalah milik syah dari para penggugat;

Menyatakan hukumnya bahwa para tergugat telah menguasai/menggarap tanah sawah sengketa secara tidak syah sejak tahun 1974;

Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II baik sendiri ataupun bersama-sama atau siapa saja yang telah menguasai tanah sengketa lantaran tergugat I dan atau tergugat II agar menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada para penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);

Menghukum para tergugat baik sendiri maupun bersama-sama untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp. 6.335,- (enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 16 April 1983 No. 318/1980/Pdt/PT.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para tergugat pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 24 Oktober 1979 No. 15/1979 Pdt.G., dan mengadili sendiri;

Mengabulkan gugatan para Penggugat Terbanding untuk sebagian;

Menyatakan bahwa para Penggugat Terbanding adalah ahli waris almarhum ki Sanrodji Rijun dan ni Sanrodji Rijun;

Menolak gugatan para Penggugat Terbanding untuk selebih dan selainnya;

Menghukum para Penggugat Terbanding membayar biaya yang timbul dari perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 6.535,- (enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Memerintahkan pengiriman turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Purbalingga;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para penggugat terbanding pada tanggal 17 Agustus 1983 kemudian terhadapnya oleh penggugat I terbanding diajukan permohonan untuk peme-

riksaan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Agustus 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 4/Pdt.G/Dk/1983/PN.Pbg. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Purbalingga, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 1983;

bahwa setelah itu oleh tergugat pbanding yang pada tanggal 10 Oktober 1983 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat I terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 22 Oktober 1983;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pemohon kasasi/penggugat asal I tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang, karena Pengadilan Tinggi hanya memperhatikan memori banding dari para termohon kasasi/para tergugat asal saja;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menghubung-

kan keterangan saksi Muheni, yang menerangkan harga jual beli tanah sawah tersengketa sebanyak Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dengan keterangan saksi Arsawiredja dan Machrodji adalah jelas tidak logis;

3. Bahwa pemohon kasasi/penggugat asal I tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi tentang kertas zegel jual beli, karena hilangnya kertas zegel jual beli adalah hal yang aneh, dan dapat saja para termohon kasasi/para tergugat asal melaporkan kehilangan kertas zegel tersebut, walaupun tidak ada zegel yang hilang, karena sifatnya hanya melapor saja;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena telah menolak gugatan dengan tidak didasarkan kepada alat-alat bukti balik yang cukup, pada hal pemohon kasasi/penggugat asal telah dengan sempurna membuktikan gugatannya:

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan pemohon kasasi Raslam alias Rasmidi tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan sendiri putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 April 1983 No. 318/1980/Pdt/PT.SMG harus dibatalkan, karena ternyata Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian.

Menurut pasal 472 H.I.R. seharusnya Pengadilan Tinggi menilai kesaksian yang ada dengan hal-hal lain yang diketemukan dalam persidangan, pada hal ternyata keterangan saksi tidak saling menguatkan, juga tidak bersesuaian, antara lain:

Pada halaman 10 berita acara pemeriksaan saksi Muheni (Kepala Desa) menjelaskan bahwa yang menerima pembayaran ialah Sanrodji; sedangkan menurut tergugat yang menerima pembayaran ialah Sanrodji dan anak-anaknya;

Juga pada halaman 10 berita acara pemeriksaan saksi Muheni menerangkan bahwa yang ikut menyaksikan jual beli termasuk Carik (saksi Arsawiredja). Ternyata dalam berita acara pemeriksaan halaman 12 Carik ini menyatakan bahwa:

mendengar adanya jual beli tanah terperkara, sedangkan tentang pembayaran saksi tidak tahu, tetapi saksi hanya disuruh Pak Lurah (saksi Muheni) untuk melintirnya;

Jadi disamping saling bertentangannya keterangan saksi ini dengan saksi Muheni berarti keterangannya ini juga adalah kesaksian de auditu. Keterangan saksi III tergugat (Muchroji) dalam berita acara pemeriksaan halaman 13 bertentangan dengan keterangan saksi II.

Hal ini dapat dilihat, saksi III mengatakan: yang mengajukan menyaksikan pembayaran jual beli tanah terperkara antara lain saksi II (Carik), dan yang menjelaskan tentang jual beli ialah saksi I (Kepala Desa) dan saksi II (Carik), pada hal jika hal ini dihubungkan dengan keterangan saksi II, hal ini tidak tepat, sebab saksi II sendiri hanya mendengar tentang jual beli dan sama sekali tidak tahu tentang pembayarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi; Raslam alias Rasmidi tersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 April 1983 No. 318/1980/Pdt/PN.Smg. harus dibatalkan sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalinga tanggal 24 Oktober 1970 No. 15/1979 Pdt.G. tersebut yang dianggap telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termohon termohon kasasi/tergugat-tergugat asal sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dan tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Raslam alias Rasmidi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 April 1983 No. 318/1980/Pdt/PT.Smg.;

Mengadili sendiri:

Mengabulkan gugat para penggugat untuk sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;

Menyatakan hukumnya, bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum ki Sanrodji Rijun dan ni Sanrodji Rijun;

Menyatakan hukumnya bahwa almarhum ki dan ni Sanrodji Rijun telah meninggalkan warisan berupa tanah sawah sengketa yang belum dibagi waris;

Menyatakan hukumnya bahwa tanah sawah sengketa adalah milik syah dari para penggugat;

Menyatakan hukumnya bahwa para tergugat telah menguasai/menggarap tanah sawah sengketa secara tidak syah sejak tahun 1974;

Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II baik sendiri ataupun bersama-sama atau siapa saja yang telah menguasai tanah sengketa lantaran tergugat I dan atau tergugat II agar menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada para penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
Mengkukum termohon-termohon kasasi/tergugat-tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dan tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kami tanggal 11 Juli 1985 dengan Mohamad Yahya Adiwimarta SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Kohar Hari Soemarno SH dan M. Yahya Harahap SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 1985 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Dora Sasongko Kartono SH. dan M. Yahya Harahap SH, Hakim-Hakim Anggauta dan Soedjono SH, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Menyatakan hukumnya, bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum ki Sanrodji Rijun dan ni Sanrodji Rijun;

Menyatakan hukumnya bahwa almarhum ki dan ni Sanrodji Rijun telah meninggalkan warisan berupa tanah sawah sengketa yang belum dibagi waris;

Menyatakan hukumnya bahwa tanah sawah sengketa adalah milik syah dari para penggugat;

Menyatakan hukumnya bahwa para tergugat telah menguasai/menggarap tanah sawah sengketa secara tidak syah sejak tahun 1974;

Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II baik sendiri ataupun bersama-sama atau siapa saja yang telah menguasai tanah sengketa lantaran tergugat I dan atau tergugat II agar menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada para penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI.);

Menghukum para tergugat baik sendiri maupun bersama-sama untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp. 6.350,- (enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan pemeriksaan banding No. 15/1979. Daftar banding yang dibuat oleh Pjs. Panitera-Kepala Pengadilan Negeri Purbalingga bahwa pada tanggal 24 Oktober 1979 Madarun dan Ny. Madarun, menyatakan mohon pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada para pihak lawannya dengan relaas tertanggal 29 Nopember 1979;

Membaca memori banding yang telah diajukan oleh para tergugat pembanding tertanggal - dan telah diberitahukan kepada para pihak lawan dengan relaas tertanggal 18 April 1980;

Meinbaca kontra memori banding yang telah diajukan oleh kuasa para penggugat terbanding tertanggal 19 Mei 1980, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawan dengan relaas tertanggal 21 Mei 1980;

Tentang hukum :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat bading yang diminta oleh para tergugat pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat seperti diatur di dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para tergugat-pembanding didalam memorinya

yang dibubuhi cap jempol oleh tergugat II pembeding dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 13 Maret 1980, mengemukakan keberatan atas penafsiran pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961;

Menimbang, bahwa didalam kontra memorinya, para penggugat-terbanding tidak menemukan hal-hal baru, sehingga tidak perlu ditanggapi secara khusus;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan menanggapi keberatan tergugat-pembeding sekaligus dalam rangka mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam membagi beban pembuktian kepada para pihak. Para tergugat-pembeding membenarkan, bahwa sawah sengketa semula milik almarhum Sanrodji al. Rijun dan Ni Sanrodji Rijun yang telah dibeli pada ± tahun 1965/1966 dan mulai dikuasai sejak tahun 1970. Oleh karena penjualan sawah sengketa disangkal oleh para penggugat terbanding, maka tepatlah bahwa para tergugat-pembeding membuktikan adanya jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang nilai alat bukti yang diajukan oleh para tergugat-pembeding, apakah dengan alat bukti tersebut para tergugat-pembeding berhasil menegakkan dalil sangkalannya, bahwa tanah sawah sengketa sudah dibeli plas dari almarhum Sanrodji Rijun;

Menimbang, bahwa saksi Muheni yang pada tahun 1963/1966 masih menjabat sebagai Kepala desa Karanggambas, menyaksikan terjadinya jual beli sawah sengketa antara Sanrodji Rijun dengan para tergugat-pembeding, dengan harga Rp. 40.000,- Bahwa perjanjian jual beli tersebut, pembayarannya dibuatkan tanda-terima dengan segel;

Menimbang, bahwa saksi Muchrodji, sekalipun kedatangannya di kelurahan tidak sengaja diminta menyaksikan adanya jual beli, namun saksi mengetahui terjadinya jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Arsawiredjo, sekalipun dalam keterangannya mengatakan tidak tahu adanya jual beli, namun saksi benar telah melaksanakan perubahan nama (mutasi) dalam buku C Desa, dari nama Sanrodji kepada Sakini alias Ni Madarun pada tanggal 18 April 1967 sekaligus dengan menunjukkan asli buku C desa bersangkutan;

Menimbang, bahwa para tergugat pembeding mulai menggarap tanah sawah sengketa pada tahun 1970, setelah selesai masa sewa dari orang lain;

Menimbang, bahwa proses jual beli, perubahan nama dalam buku C desa dan permulaan para tergugat pembanding menggarap tanah sawah sengketa terjadi pada sa'at sebelum Sanrodji Rijun meninggal dunia pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa seandainya penguasaan para tergugat-pembanding atas sawah sengketa yang sudah dimulai tahun 1970 itu tidak didasarkan atas suatu titel hak, pastilah para ahli waris almarhum Sanrodji Rijun akan meminta sawah sengketa, setidak-tidaknya sesaat setelah Sanrodji Rijun meninggal tahun 1974. Namun kenyataan para ahli waris baru menggugat tahun 1979, setelah para tergugat pembanding kecurian, dan berdasarkan laporan kepada yang berwajib, ikut serta terbawa pencuri surat-surat bukti pembelian sawah sengketa dan bukti pembayarannya;

Menimbang, bahwa satu-satunya saksi yang diajukan oleh para penggugat terbanding yaitu saksi Mustawiredja keterangannya tidak dapat melemahkan bukti-bukti dari pihak tergugat pembanding, bahkan tentang meninggalnya Sanrodjipun saksi menyebutkan tahun yang salah yaitu tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa para tergugat pembanding telah berhasil membuktikan terjadinya jual beli tanah sengketa antara almarhum Sanrodji Rijun dengan para tergugat pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah dipertimbangkan tentang sah tidaknya jual beli yang terjadi antara almarhum Sanrodji Rijun dengan para tergugat pembanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan para tergugat pembanding, yang dalam memorinya menyatakan bahwa jual beli itu sah sekalipun tidak dilaksanakan seperti dalam ketentuan pasal 19 P.P. No. 10 tahun 1961. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa akta jual beli seperti diatur dalam pasal 19 P.P. No. 10 tahun 1961 adalah syarat formal untuk kepentingan balik nama, sehingga jual beli tanah yang dilaksanakan secara adat adalah sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jual beli tanah sengketa antara almarhum Sanrodji Rijun dan para tergugat pembanding adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa para penggugat terbanding tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang tanah sengketa, oleh karena mana gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang tanah ditolak, maka gugatan lain yang ada hubungan dengan tanah sengketa haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah alpa mempertimbangkan gugatan para penggugat terbanding, tersebut dalam petitum angka 2;

Menimbang, bahwa kedudukan para penggugat terbanding sebagai ahli waris almarhum ki Sanrodji Rijun dan Ni Sanrodji Rijun tidak disangkal oleh para tergugat pembeding, haruslah dianggap terbukti menurut hukum, dan gugatan para penggugat terbanding sepanjang mengenai kedudukannya sebagai ahli waris almarhum ki Sanrodji Rijun dan Ni Sanrodji Rijun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 24 Oktober 1979 No. 15/1979 Pdt.G., dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para penguat terbanding adalah sebagai pihak yang kalah, seharusnya dihukum membayar biaya perkara daam dua tingkatperadilan;

Mengingat akan aturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para tergugat pembeding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 24 Oktober 1979 No. 15/1979 Pdt.G., dan mengadili sendiri;

Mengabulkan gugatan para penggugat terbanding untuk sebagian;

Menyatakan bahwa para penggugat terbanding adalah ahli waris almarhum ki Sanrodji Rijun dan Ni Sanrodji Rijun;

Menolak gugatan para penguat terbanding untuk selebihnya dan selainnya;

Menghukum para penggugat terbanding membayar biaya yang timbul dari perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 6.535,- (enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Memerintahkan pengiriman turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Purbalingga;

Demikianlah diputus pada hari Sabtu, tanggal 16 April 1983 dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh J. Suwanto SH, Hakim

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri di Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Raslam al Rasmudi;

Chamid;

Misem;

Slamet;

Suryat;

Maryun;

Sirat;

Turkiman;

Suhad;

kesemuanya bertempat tinggal di desa Karanggambas, kecamatan Kalimanah, kabupaten Purbalingga, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama R. Joedjono SH, advokat & pengacara, bertempat tinggal di jalan Kyai Mursid No. 1 desa Sokaraja Lor, kecamatan Sokaraja, kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 1979, selanjutnya disebut para penggugat;

lawan

1. *Madarum*, Bau I, sebagai tergugat I;

2. *Ni Madarum*, sebagai tergugat II;

kesemuanya bertempat tinggal di desa Karanggambas, kecamatan Kalimanah, kabupaten Purbalingga; selanjutnya disebut para tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugat para penggugat tanggal 16 Mei 1979 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 16 Mei 1979 No.: 15/1979 Pdt. G.;

Telah mendengar keterangan ke dua belah pihak yang berperkara beserta saksi saksinya;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang bersangkutan;

Telah pula memperhatikan segala kejadian dalam pemeriksaan persidangan perkara tersebut;

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatnya tanggal 16 Mei 1979 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 16 Mei 1979 dan terdaftar dalam register No.: 15/1979 Pdt. G. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: bahwa ki Sanrodji Rijun telah melangsungkan perkawinan dengan ni Sanrodji Rijun, tetapi para penggugat tidak tahu pasti tahun dilangsungkannya perkawinan tersebut;

bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah menghasilkan keturunan sebanyak lima orang anak, yang masing-masing bernama Kami, Raslam al. Rasmudi, Chamid, Misem dan Slamet;

bahwa ki Sanrodji telah meninggal dunia pada tahun 1974 serta ni Sanrodji juga meninggal dunia sebelum ki Sanrodji (mendahului meninggal dunia);

bahwa dari keturunan ki Sanrodji Rijun dan ni Sanrodji Rijun tersebut, maka anak pertama yang bernama Kami juga telah meninggal dunia;

bahwa sebelum Kami telah melangsungkan perkawinan dengan ki Sanmungin dan meninggalkan lima orang anak, yang masing-masing bernama: Suryat, Maryun, Sirat, Tukiman, dan Suhad;

bahwa dari perkawinan antara ki Sanrodji Rijun dan ni Sanrodji Rijun disamping meninggalkan keturunan seperti tersebut di atas, juga meninggalkan warisan berupa tanah sawah yang dikenai sekarang dengan letter C No. 442, persil No. 40 S II seluas ± 400 ubin dengan batas batas sebagai berikut:

Utara	: Sawah Sumardjo Umar;
Timur	: Sungai Kalong;
Selatan	: Sawah Sanmurdi;
Barat	: Sungai Tinggar;

bahwa barang warisan tersebut diatas sedari sekitar tahun 1970 sampai dengan sekarang telah dikuasai dan digarap oleh tergugat I;

bahwa para penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menghubungi tergugat I agar persoalan ini dapat diselesaikan secara damai, tetapi para tergugat tidak bersedia dengan alasan tergugat I telah membeli sawah sengketa dari orang tua/kakek para penggugat dan sawah sengketa da-

lam buku desa dinamakan tergugat II atas permintaan tergugat I;
bahwa akibat tindakan tindakan dari para tergugat tersebut sangat merugikan para penggugat karena para penggugat tidak dapat menggarap tanah sawah sengketa serta mengadakan pembagian waris sesuai dengan hukum yang berlaku;

bahwa atas dasar perhitungan yang wajar tanah sawah sengketa setiap tahun dapat menghasilkan padi kering 12 kwintal bersih;

bahwa para penggugat khawatir selama pemeriksaan ini berjalan para tergugat berusaha memindahkan pemilikan tanah sawah sengketa diletakkan sita jaminan;

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga berkenan kiranya memanggil para penggugat dan para tergugat guna diperiksa mengenai perkara ini serta karena perkara ini mengenai pemilikan tanah mohon juga agar Pengadilan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu biarpun ada verzet, banding dan atau kasasi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya, bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum ki Sanroddi Rijun dan ni Sanroddi Rijun;
3. Menyatakan hukumnya bahwa almarhum ki dan ni Sanroddi Rijun telah meninggalkan warisan berupa tanah sawah sengketa yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan hukumnya bahwa tanah sawah sengketa adalah milik sah dari para penggugat;
5. Menyatakan hukumnya bahwa para tergugat telah menguasai/menggarap tanah sawah sengketa secara tidak sah tahun 1974;
6. Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II baik sendiri ataupun bersama atau siapa saja yang telah menguasai tanah sengketa lantaran tergugat I dan atau tergugat II agar menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada para penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);
7. Menghukum para tergugat baik sendiri maupun bersama agar mengganti kerugian kepada para penggugat berupa padi kering sebanyak 12 kwintal setiap tahun terhitung mulai tahun 1974 sampai dengan keputusan ini berkekuatan hukum pasti;
8. Menghukum para tergugat baik sendiri ataupun bersama membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap hari bila para tergugat lalai tidak memenuhi bunyi putusan ini;
9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;

10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

11. Biaya menurut hukum;

atau

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain agar memberikan keputusan yang adil dan layak.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pihak penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama R. Joedjono SH, tersebut di muka, sedangkan untuk pihak tergugat telah datang menghadap sendiri:

Menimbang, bahwa telah diusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara tersebut di muka, akan tetapi tidaklah berhasil oleh karena itu telah dibacakan oleh Hakim surat gugat penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa secara lisan di depan sidang pihak tergugat menjawab bahwa tanah sawah sengketa adalah sudah menjadi miliknya hasil dari jual beli antara ki Sanrodji Rijun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian ini perhatikanlah keterangan tentang keadaan keadaan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan dalam perkara ini;

Tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang, bahwa tergugat yang bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili tergugat II menjawab bahwa benar sawah sengketa tersebut dulunya adalah miliknya Sanrodji (yang meninggal pada tahun 1974) dan sejak tahun 1970 benar telah dikuasai oleh tergugat karena tanah sawah sengketa itu ± tahun 1965/1966 telah dibeli plas oleh tergugat dengan harga Rp. 40.000,- dari Sanrodji akan tetapi oleh karena pada waktu itu sawah tersebut sedang dalam keadaan di sewa orang lain dan baru kembali pada tahun 1970 maka sejak tahun 1970 itu tergugat baru menguasainya dan menggarapnya. Adapun mengenai lintirannya (pindah nama) di letter C desa Karanggambas dilaksanakan tanggal 18 April 1967 atas nama Ni Madarum (tergugat II isteri tergugat I). Jadi tergugat II adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa para penguat melalui kuasanya menyatakan tidak dapat menerima jawaban tergugat tersebut dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan jawaban penggugat tersebut yang

pada pokoknya tidak dapat mengakui adanya jual beli antara tergugat dan Sanrodji almarhum dengan perkataan lain tidak pernah terjadi jual beli maka tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi antara lain: Saksi Muheni, umur 63 tahun, kepala desa Karanggambas, Arsawiredja, umur 60 tahun, carik desa Karanggambas, dan Muchrodji, umur 40 tahun, dari desa Karanggambas, semuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Muheni, menerangkan bahwa ia menyaksikan adanya jual beli lepas (plas) sawah sengketa antara tergugat dan Sanrodji orang tua para penggugat, jual beli terjadi dirumah saksi dan dibayar lunas seharga Rp. 40.000,-- ditempat tersebut;

Untuk pembayaran mana dibuat tanda terima dengan segel disaksikan oleh semua junjung (pamong) yang masih hidup sekarang adalah carik Arsawiredja, Sumiardi dan Santoyib;

Arsawiredja, (carik), menerangkan bahwa ia merasa tidak tahu menahu tentang adanya jual beli dan pembayaran dirumah kepala desa atas sawah sengketa tersebut, ia mengakui dalam letter C desa Karanggambas telah melaksanakan perubahan nama dari Sanrodji kepada Sakini al. Ni Madarun (tergugat II), akan tetapi ia hanya disuruh mengerjakan itu oleh pak Lurah (saksi Muheni tersebut diatas), perubahan itu dilakukan tanggal 18 April 1967 (dengan memperlihatkan asli bukti letter C desa tersebut);

Muchrodji: memberikan keterangan bahwa ia ikut menyaksikan waktu diadakannya perjanjian jual lepas dirumah pak Lurah, tetapi ia bukan sebagai saksi melainkan hanya kebetulan berada ditempat itu, saksi selanjutnya menerangkan pula bahwa ia melihat Sanrodji dan ni Sanrodji yang juga turut hadir, disamping itu hadir yang lain, carik desa, Samiardi, pak Bau (tergugat I), Kartawirejda dan lain-lain, dan saksi juga mendengar/melihat waktu sudah ada tawar menawar dengan harga mulai Rp. 35.000,--;

Menimbang, bahwa penggugat tidak dapat menerima keterangan keterangan saksi-saksi tersebut karena bertentangan antara satu sama lainnya menjadi simpang siur, bahkan ada yang bertentangan seperti halnya saksi carik desa Arsawiredja ternyata mengaku tidak ikut menyaksikan jual beli ia hanya mendengar dari orang lain;

Selanjutnya para penggugat telah pula mengajukan seorang saksi; Mustawiredja, umur 45 tahun, setelah disumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa sawah sengketa tersebut adalah sawahnya Sanrodji (sawah bekas pekulen), dulu Sanrodji kuli, penggarapnya,

adapun mengenai sudah penjualannya ia tidak tahu;

Menimbang, bahwa telah ditanyakan dalam persidangan tentang tanda terima dengan segel sewaktu terjadi pembayaran dirumah Kepala desa, oleh tergugat dikatakan bahwa tanda terima tersebut dulu ada tetapi katanya sudah hilang diambil pencuri, tanpa ada penjelasan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan keterangan saksi-saksi yang diajukan tergugat, kepala desa dan carik desa, Arsawiredja tidak pernah merasa menjadi saksi jual beli tersebut, sedangkan saksi Muheni kepala desa menyatakan Arsawiredja sebagai saksi waktu terjadinya perjanjian jual beli sawah sengketa dirumah Kepala desa Karanggambas;

Menimbang, bahwa antara saksi Muheni (kepala desa Karanggambas) dan saksi Muchrodji juga menunjukkan kurang adanya persesuaian dimana menurut Muchrodji pada saat itu (dirumah kepala desa Karanggambas) antara tergugat dan Sanrodji, masih terjadi tawar menawar dan Sanrodji waktu itu disertai dengan isterinya, sedangkan menurut keterangan saksi Kepala desa Karanggambas dirumahnya tinggal pelaksanaan pembayaran harga Rp. 40.000,-;

Menimbang, bahwa saksi kepala desa Karanggambas mengetahui bahwa sejak saat mulai berlakunya U.U.P.A. berikut peraturan penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut dalam P.P. No. 10 tahun 1961 mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1961 yang didalam pasal 19 peraturan tersebut dinyatakan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria yaitu P.P.A.T. Dan kepala desa bahwa dilarang bila ia ikut menguatkan jual beli tanpa tata cara seperti tersebut dalam pasal 19 itu walaupun demikian bisa pula dimengerti bahwa pada saat-saat itu masih banyak praktek-praktek di desa-desa dimana jual beli dilakukan menurut tata cara yang lama yaitu dimana perjanjian itu paling sedikit harus disaksikan oleh saksi-saksi pamong desa dan orang-orang yang mempunyai itu berdampingan dengan tanah yang dijual itu. dalam perkara ini ternyata saksi pamong desa yaitu Kepala desa keterangannya kurang meyakinkan, saksi saksi lain tidak dapat didengar sedangkan saksi carik desa bertentangan dengan keterangan saksi kepala desa;

Menimbang, bahwa tentang harga bilamana tergugat mengaku membeli tanah sengketa pada waktu itu tahun 1967 dengan harga Rp. 40.000,- maka akan kurang sesuai dengan harga tanah pada waktu itu setelah dicocokkan dengan harga sewa tanah sawah tersebut dalam buku sewa tanah desa Karanggambas yang diperlihatkan dalam persidangan

an Pengadilan yang menyebutkan bahwa seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian dari tanah sengketa disewa dari tahun 1966 s/d tahun 1971 seharga Rp. 20.000,— dan seperempat bagian yang lain disewa dari tahun 1964 s/d tahun 1974 seharga Rp. 27.500,—, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan Rp. 40.000,— itu tidak mungkin merupakan harga sawah tersebut dengan beli plas;

Menimbang, bahwa karenanya alasan tergugat yang mengatakan bahwa tanah sengketa telah dibelinya secara plas dengan harga Rp. 40.000,— berdasarkan alat-alat bukti baik yang berupa saksi-saksi ataupun yang berupa catatan dalam buku letter C desa Karanggambas yang menyatakan adanya pelintiran hak dari Sanrodji kepada isteri tergugat I atau tergugat II yang bernama ni Madarun dan catatan-catatan yang terdapat dalam buku daftar sewa tanah desa Karanggambas dianggap tidak dapat membuktikan adanya hak milik ni Madarun (tergugat II) atas tanah sengketa tersebut dan Pengadilan menganggap bahwa jual beli plas tanah sengketa antara para tergugat dan Sanrodji dianggap tidak pernah ada hingga kepadanya harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah perkara dengan dibebankan kepadanya untuk membayar ongkos perkara; Sedangkan kepada penggugat dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang menang;

Menimbang, akan tetapi kerugian-kerugian akibat telah dinikmati-nya hasil dari sawah sengketa tersebut oleh tergugat karena mengingat bukti-bukti yang kurang lengkap bilamana dihubungkan keadaan pada dewasa ini dimana sering tanaman-tanaman dilanda macam-macam hama dan sebagainya, Pengadilan menganggap pantas bilamana tergugat tidak perlu dibebani penggantian kerugian;

Memperhatikan akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan antara lain: pasal 181 (1), pasal-pasal dari Bab. IX R.I.D., U.U.P.A. dan P.P. no. 10 tahun 1961;

MENGADILI

Mengabulkan gugat para penguat untuk sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;

Menyatakan hukumnya, bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum ki Sanrodji Rijun dan ni Sanrodji Rijun;

Menyatakan hukumnya bahwa almarhum ki dan ni Sanrodji Rijun telah meninggalkan warisan berupa tanah sawah sengketa yang belum dibagi waris;

Menyatakan hukumnya bahwa tanah sawah sengketa adalah milik

syah dari para penggugat;

Menyatakan hukumannya bahwa para tergugat telah menguasai/menggarap tanah sawah sengketa secara tidak syah sejak tahun 1974;

Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II baik sendiri ataupun bersama-sama atau siapa saja yang telah menguasai tanah sengketa lantaran tergugat I dan atau tergugat II agar menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada para penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);

Menghukum para tergugat baik sendiri maupun bersama-sama untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp. 6.335,— (enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputus pada hari ini Rabu tanggal 24 Oktober 1979 oleh kami Harjono SH, Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, keputusan mana seketika itu juga diucapkan dimuka umum dihadapan tergugat I dan dihadiri oleh Ny. Soemarsih, Panitera Pengganti tersebut.